



Judul : Perubahan Iklim Berdampak Pada Anak
Tanggal : Jumat, 05 Januari 2024
Surat Kabar : Website DPR
Halaman : 7

Perubahan Iklim Berdampak pada Anak

JAKARTA, (PR).-

Perubahan iklim dapat berdampak pada kesejahteraan anak. Pemerintah didorong untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk mencegah dan menangani dampak krisis iklim terhadap anak.

Laporan UN Women Tahun 2023 menyebutkan, 158,3 juta perempuan dan anak-anak dapat menghadapi kemiskinan pada 2050 sebagai dampak perubahan iklim.

Dalam laporan bertajuk "*Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2023*", disebutkan, perubahan iklim bisa memperburuk kerentanan perempuan terhadap kemiskinan dan kelaparan. Data lainnya, investasi dalam paket stimulus SDG dinilai bisa membantu mengurangi jumlah kemiskinan ekstrem dari 158,3 juta menjadi 43,3 juta.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan, krisis iklim dengan kekerasan terhadap anak, bisa berhubungan secara langsung dan tidak. "Jangan lupakan, kekerasan domestik terhadap anak meningkat seiring tingkat stres keluarga yang naik akibat ketidakpastian ekonomi," ujarnya, Kamis (1/1/2024).

Selain itu, anak-anak merupakan kelompok paling rentan terdampak perubahan iklim dari segi kesehatan. Dampak dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, mampu memengaruhi kesehatan fisik dan mental anak-anak. Termasuk, bisa menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga. "Hal ini terjadi karena anak-anak memiliki karakteristik dan fungsi fisiologis yang berbeda dengan orang dewasa," katanya.

Willy mengatakan, isu terkait pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan akibat krisis iklim merupakan wacana yang baru bagi Pemerintah Indonesia. Karena itu, komitmen harus terus dibangun.

Ia mengklaim, pihaknya akan terus mengedepankan berbagai peraturan yang pro terhadap perlindungan anak dan perempuan. Menurut dia, pemerintah juga perlu menegakkan Undang-Undang Nomor 35/2014 untuk mencegah dan menangani dampak krisis iklim terhadap anak. Hal itu agar krisis iklim tidak menambah korban kekerasan anak di dalam keluarga.

"Tegakkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai langkah tegas menghukum pelaku kekerasan terhadap anak. Langkah itu harus dibarengi dengan adanya bantuan bagi keluarga Indonesia yang terancam kemiskinan dan dampak perubahan iklim," katanya.

Willy mengatakan, ke depan masih ada RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang juga mewacanakan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor pekerjaan domestik. "Di banyak undang-undang dan peraturan pemerintah, perlindungan anak, terus menjadi *concern* bersama," ujarnya. **(Muhammad Ashari)*****